



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA

Disampaikan oleh : G. Budisatrio Djiwandono
Nomor Anggota : A-127
Daerah Pemilihan : Kalimantan Timur

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalammu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Yang kami hormati :

*Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus IKN
Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI
Saudara Menteri Dalam Negeri RI
Saudari Menteri Keuangan RI
dan hadirin yang kami muliakan.*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kasih, atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kita berkesempatan menjalankan tugas-tugas negara kali ini dalam hal pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (RUU IKN).

Rencana pemindahan ibukota negara bukanlah sebuah rencana baru. Rencana ini telah muncul sejak Presiden RI yang pertama, Bung Karno, telah mewacanakan pemindahan ibukota negara ini di masa pemerintahannya.

Fraksi Partai GERINDRA DPR-RI menyadari, bahwa membahas rencana pemindahan ibukota negara haruslah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian serta melibatkan publik yang luas dalam prosesnya. Karena rencana ini melingkupi banyak nilai historis dan sosiologis termasuk aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada para pendiri negara dan juga generasi penerus kita.

Dalam proses pembahasan RUU IKN diluar agenda rapat-rapat Pansus, Fraksi Partai GERINDRA juga telah meminta masukan para ahli dari berbagai disiplin ilmu serta secara pro aktif mengundang perwakilan Anggota DPRD, se Kalimantan Timur, Lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, LSM, dan



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



jajaran kesultanan dalam lingkup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam rangka mendengarkan dan menerima masukan, saran dan pendapat serta aspirasi mereka dalam pembahasan RUU IKN ini.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU IKN, para Menteri Wakil Pemerintah, dan hadirin yang kami muliakan.

Fraksi Partai GERINDRA DPR-RI menyadari bahwa ada sebuah kebutuhan untuk memindahkan ibukota negara. Pemindahan ini pun telah mendapatkan dukungan DPR RI. Maka kebijakan yang digariskan oleh Fraksi Partai GERINDRA adalah mensukseskan kebijakan tersebut dengan mencermati draft Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan konsep rencana induk (*Master Plan*) yang diajukan pemerintah untuk memastikan agar Rancangan Undang-Undang ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aspek-aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan dan masa depan bangsa dan negara. Sehingga pemindahan Ibukota Negara ini dapat menjadi sebuah cerita sukses dari deretan cerita perpindahan Ibukota Negara di negara-negara lain.

Karena itu, semua aspek terkait pemindahan ibukota negara yang disampaikan oleh Pemerintah, telah dipelajari dan dibahas oleh DPR RI Bersama dengan Pemerintah dalam kurun waktu yang telah diagendakan.

1. Fraksi Partai GERINDRA DPR-RI mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi lain dan Pemerintah yang telah mengakomodir usulan fraksi kami mengenai "asas, tujuan dan ruang lingkup".

Namun, Fraksi Partai GERINDRA DPR-RI masih berharap terakomodirnya 'demokrasi' sebagai salah satu asas dalam RUU IKN. Sehingga aspirasi politik masyarakat di Daerah Khusus IKN dapat terwadahi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. ✓

2. Fraksi Partai GERINDRA DPR-RI juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi dan pemerintah yang mengakomodir usulan titik koordinat sebagai kepastian batas wilayah KSN IKN.
3. Fraksi Partai GERINDRA DPR-RI juga mendorong terpenuhinya aspek kebhinnekaan di Ibukota yang baru. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan berbangsa dan bernegara, tidak cukup hanya diekspresikan secara monumental, dalam desain bangunan. Namun, kebhinnekaan itu harus dicerminkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Ibukota Negara yang baru. Ibukota Negara yang baru harus dibangun di atas landasan filosofis sehingga pembangunan fisik dan sosialnya tidak meminggirkan masyarakat lokal dan tidak menciptakan jurang kaya-miskin. Ibukota baru tidak boleh menjadi



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



taman indah yang dikelilingi permukiman kumuh, tetapi harus mampu membangun konektivitas kemajuan ekonomi antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi, khususnya di Pulau Kalimantan.

4. Pemindahan Ibukota Negara jelas merupakan proyek besar yang sarat modal, yang pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap dalam kurun waktu 2022-2045. Rentang waktu panjang ini diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan kebijakan pendukung lainnya sehingga dapat berkelanjutan. Fraksi Partai GERINDRA mengingatkan Pemerintah untuk senantiasa berpedoman dalam UU no. 17 tahun 2003 dalam merealisasikan 3 skema pembiayaan yaitu APBN senilai 90,4 T (19,4%), KPBU senilai 252,2 T (54,2%), Swasta senilai 123 T (26,4%). Agar betul-betul secara sungguh-sungguh memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi berbagai faktor dan masih mengalami tantangan yang tidak ringan. Dalam pelaksanaan pembangunan jika melibatkan BUMN khususnya BUMN Karya, maka Fraksi Partai GERINDRA kembali mengingatkan tentang rasio hutang BUMN Karya sehingga perlu pertimbangan yang mendalam sebelum memutuskan pelaksanaan kebijakan pembangunan KSN IKN tersebut.
5. Dilihat dari aspek historis, Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia memiliki peran yang begitu penting dan panjang. Banyak peristiwa bersejarah yang terjadi dan berawal di Jakarta. Pasca Pemindahan status IKN ke Kalimantan Timur maka keberadaan Jakarta sebagai Daerah Khusus tetap harus dipertahankan dan diperkuat mengingat perjalanan panjang sejarah kota ini. Pendapat Fraksi Partai GERINDRA Jakarta layak dijadikan daerah khusus sebagai pusat ekonomi, bisnis dan keuangan karena ekosistem ekonomi, bisnis dan keuangan nasional telah terbentuk sejak 74 tahun yang lalu di Jakarta, dimana Jakarta telah memiliki infrastruktur yang lengkap.

Kami juga mengingatkan Pemerintah akan hal lain yang mendapat perhatian yang tinggi dari publik, yaitu potensi aset Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta yang ditinggalkan. Nilai aset Pemerintah Pusat ini mencapai Rp. 1.009 triliun pada akhir tahun 2020. Fraksi Partai GERINDRA meminta agar aset-aset tersebut tetap menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan tidak akan pernah berpindah tangan. Fraksi Partai GERINDRA berpendapat, pemerintah harus memiliki perencanaan yang tepat sesuai UU nomor 1 tahun 2004 dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) agar tetap memiliki nilai keekonomian yang tinggi serta kemanfaatan yang produktif.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU IKN, para Menteri Wakil Pemerintah, dan hadirin yang kami muliakan.

6. Ibukota negara sebagai sebuah Kawasan Strategis Nasional yang juga merupakan objek vital nasional harus memiliki sebuah sistem pertahanan yang



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



tangguh. Sistem pertahanan ini harus mampu mengantisipasi segala bentuk ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

Fraksi Partai GERINDRA DPR-RI mendorong agar pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di IKN mampu menjawab semua kemungkinan dan skenario terburuk yang mungkin terjadi.

Beberapa hal lain yang muncul dalam pembahasan RUU IKN ini, yang telah kami sampaikan dalam rapat-rapat Pansus RUU IKN, antara lain: masalah alih fungsi kawasan hutan dalam IKN, keberadaan hutan dan tanah adat serta dampak lingkungan hidup dari pembangunan KSN Ibukota Negara terhadap ekosistem perairan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya, Fraksi Partai GERINDRA mengingatkan Pemerintah agar sungguh-sungguh menyiapkan program konservasi alam dan lingkungan hidup di Ibukota Negara yang Baru dengan memberdayakan pula masyarakat adat secara konsisten dalam menjaga hutan dan lingkungan.

Kita berharap pembangunan IKN yang baru menjadi momentum untuk memperkuat daerah penyangga IKN serta memperbaiki dan merehabilitasi kawasan ataupun lahan yang telah terdegradasi. Fraksi Partai GERINDRA juga mengingatkan pada pemerintah tentang pentingnya penguatan ketahanan pangan pada setiap Kab/Kota penyangga KSN IKN dalam lingkup wilayah Kalimantan Timur, yang meliputi infrastruktur irigasi dan jalan usaha pertanian, infrastruktur pembibitan, lahan pertanian serta pendidikan vokasi dan skema permodalan bagi pelaku usaha sektor pangan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU IKN, para Menteri Wakil Pemerintah, dan hadirin yang kami muliakan.

7. Fraksi Partai GERINDRA berpendapat bahwa KSN Ibukota Negara yang mengusung prinsip sebagai kota cerdas, perlu didukung oleh ketersediaan pasokan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan serta berkesinambungan. Karena itu, Fraksi Partai GERINDRA mendorong pemerintah untuk menyiapkan sumber-sumber energi yang cukup untuk menjamin ketersediaan pasokan energi tersebut.
8. Dalam pendanaannya, proses pemindahan ibukota negara yang akan mengakibatkan berpindahannya sekitar 205 ribu aparat ASN, TNI, dan Polri memerlukan insentif yang memadai. Fraksi Partai GERINDRA berpendapat perlunya adanya insentif perumahan, pendidikan, kesehatan dan moda transportasi serta pangan yang layak untuk para ASN, TNI, dan Polri serta keluarganya. Pemindahan tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai humanis serta skala prioritas sesuai kebutuhan operasional Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



9. Pembangunan KSN Ibukota Negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, perlu melibatkan pengusaha dan pelaku UMKM lokal baik dalam pola kemitraan maupun dalam pola pembinaan. Fraksi Partai GERINDRA berpandangan bahwa pembangunan KSN Ibukota Negara harus bisa menjadi –katalisator pembangunan ekonomi regional Kalimantan dan Kawasan Ekonomi Nasional. Hal tersebut dapat terjadi bila dalam pembangunannya lebih mengedepankan keterlibatan SDM dan SDA dalam negeri termasuk juga Pengusaha nasional. Fraksi Partai GERINDRA mengingatkan pemerintah untuk seminimal mungkin melakukan impor bahan baku maupun tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan IKN.
10. Fraksi Partai GERINDRA menyetujui pemilihan bentuk Pemerintahan IKN sebagai sebuah Pemerintahan Daerah Khusus yang merupakan sebuah pilihan tepat berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 18B. Fraksi Partai GERINDRA menyetujui pula NUSANTARA sebagai nama Ibukota Negara yang baru dan hendaknya selalu mencerminkan Indonesia secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke.

Selanjutnya, Fraksi Partai GERINDRA meminta pemerintah menyiapkan memori penjelasan mengenai pemilihan nama KSN IKN yang memuat tentang aspek filosofis, aspek historis, aspek sosiologis dan makna futuristik sebagai pesan optimisme bagi masa depan bangsa.

Dalam struktur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara, Fraksi Partai GERINDRA mengingatkan pemerintah agar mengakomodir putra-putri terbaik dari wilayah Kalimantan termasuk di dalamnya perwakilan tokoh-tokoh adat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU IKN, para Menteri Wakil Pemerintah, dan hadirin yang kami muliakan.

Kami menyadari masih ada ide dan masukan dalam pembahasan RUU IKN yang belum terakomodir dalam RUU ini, namun kami berkeyakinan hal tersebut dapat diakomodir dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Fraksi Partai GERINDRA menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Ibukota Negara ini untuk dilanjutkan pada tingkat pembicaraan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Kami berharap catatan-catatan yang kami kemukakan di atas, juga dalam rapat-rapat Pansus, menjadi masukan dan pertimbangan yang konstruktif bagi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemindahan Ibukota Negara, juga bagi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran.

*Wa billaahit-taufiiqi wal-hidaayah,
Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Jakarta, 17 Januari 2022

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

H. Ahmad Muzani
No. Anggota A-75



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPR - RI

Sekretaris

H. Desmond J. Mahesa, SH., MH
No. Anggota A-118